

ROADMAP PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN

Kabupaten Lombok Tengah 2021



Kabupaten Lombok Tengah

Roadmap Pengembangan Mutu Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah 2021



Kabupaten Lombok Tengah
2021



KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan pendidikan Lombok Tengah yang berkualitas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah berikhtiar dengan berbagai program dan kegiatan namun disadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lainnya, serta antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini antara lain terlihat dari belum meratanya mutu pendidikan pada beberapa satuan pendidikan hal ini disebabkan oleh anggapan di masyarakat tentang adanya sekolah favorit dan tidak favorit, terbatasnya jumlah guru serta distribusi yang tidak merata, hasil uji kompetensi guru yang masih di bawah rata-rata nasional, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal, tingginya angka putus sekolah khususnya SMP, masih banyaknya sekolah belum terakreditasi dan terakreditasi C, belum optimalnya pelaksanaan pendidikan karakter serta kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah melalui Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati menugaskan Dinas Pendidikan untuk menyusun roadmap peningkatan mutu pendidikan Lombok Tengah sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan mutu pendidikan.

Penyusunan roadmap yang didukung oleh Program INOVASI Nusa Tenggara Barat ini diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Pemangku kepentingan lain dalam menyusun tahapan perencanaan peningkatan mutu pendidikan di Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 serta sebagai acuan untuk memobilisasi berbagai sumber daya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil dari penyusunan roadmap ini masih jauh dari sempurna. Sumbang saran untuk perbaikan dokumen ini pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga diperoleh dokumen yang berkualitas sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah

DRS. H. LALU MULIAWAN, M.M.
NIP.196705111997021003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Permasalahan Dan Tantangan	7
BAB III Visi Misi Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan Dan Strategi	17
BAB IV Rencana Aksi	20
BAB V Monitoring Dan Evaluasi	25
LAMPIRAN	29



BAB I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Sejumlah keberhasilan yang cukup signifikan telah dicapai dalam pembangunan mutu pendidikan di Lombok Tengah selama lima tahun terakhir. Beberapa capaian yang patut dicatat antara lain meningkatnya jumlah sekolah yang teakreditasi baik dan sangat baik, meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi, dan meningkatnya keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan mitra non-pemerintah. Berbagai regulasi dan dokumen perencanaan yang berpihak pada peningkatan mutu telah disusun dan dapat menjadi landasan yang kuat untuk lima tahun mendatang.

Berbagai data, hasil kajian, dan hasil observasi pemerintah dan mitra kuncinya memberikan indikasi kuat bahwa peningkatan mutu pendidikan secara eksponensial masih berpusat pada satuan-satuan pendidikan tertentu dan pada wilayah-wilayah tertentu. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Tantangan utama peningkatan mutu pendidikan pada lima tahun ke depan adalah memastikan perubahan positif yang telah mewujud di satuan-satuan pendidikan dan wilayah tertentu dapat disebarluaskan ke seluruh penjuru Lombok Tengah. Dengan mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan dan inklusif, Lombok Tengah akan membangun pondasi yang kuat bagi pembangunan sumber daya manusia yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.

Upaya pemerataan mutu pendidikan di Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan. Jumlah dan distribusi guru PNS merupakan salah satu permasalahan kunci. Kesesuaian penyelenggaraan pendidikan sesuai standar isi, proses dan penilaian belum terjadi sesuai harapan di banyak wilayah. Ini ditunjukkan dengan masih cukup banyaknya sekolah yang terakreditasi di bawah B. Pencapaian standar sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan juga terindikasi kuat masih mengalami banyak hambatan di berbagai wilayah. Di samping itu, data-data Kemendikbudristek dan para mitra pembangunan pendidikan menunjukkan penguasaan kecakapan dasar literasi dan numerasi masih sangat perlu ditingkatkan khususnya di wilayah-wilayah yang relatif sulit dan untuk berbagai kelompok siswa yang menghadapi tantangan terberat. Masih belum meratanya pencapaian kecakapan dasar literasi dan numerasi ini berdampak pada angka mengulang kelas, angka putus sekolah dan rendahnya angka transisi sekolah khususnya dari jenjang SD ke SMP pada wilayah dan kelompok siswa yang rentan. Penanganan berbagai masalah yang disebutkan di atas menjadi lebih menantang di masa pandemi dan normal baru ini.

Didasari keinginan kuat untuk mengurai permasalahan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan serta untuk mewujudkan visi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui program 100 Hari Kerja Bupati Wakil Bupati Lombok Tengah mengamanatkan Dinas Pendidikan untuk merancang sebuah peta jalan yang dapat menjadi acuan upaya sinergis untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dengan

amanat tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah menyusun Roadmap Peningkatan Mutu Pendidikan Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

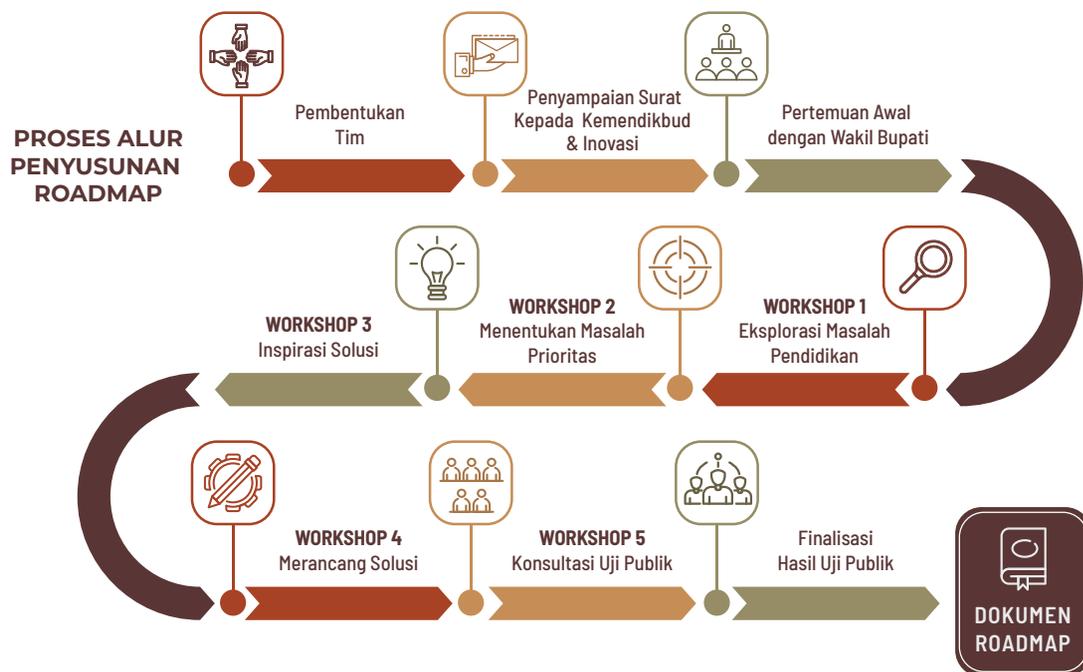
- a. Maksud
Roadmap Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai salah satu dokumen perencanaan tentang peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- b. Tujuan
Penyusunan Roadmap Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 bertujuan:
 - i. Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
 - ii. Menjadi acuan untuk memobilisasi berbagai sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

1.3 Ruang Lingkup

Roadmap Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini difokuskan pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP.

1.4 Proses Penyusunan

Proses penyusunan roadmap sejak pembentukan tim sampai menjadi dokumen lengkap digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Alur Penyusunan dokumen roadmap

Proses ini dikoordinasikan Dinas Pendidikan dengan melibatkan Bappeda Kabupaten Lombok Tengah dan berbagai stakeholder pendidikan seperti perwakilan guru, kepala sekolah, pengawas, dewan pendidikan, akademisi, dan mitra kunci non-pemerintah baik dari LSM maupun dari program-program kemitraan. Proses yang sangat partisipatif ini dipandang sangat diperlukan untuk memastikan semua pihak dapat memberikan pandangannya tentang isu dan solusi yang relevan, dan membangun rasa kepemilikan yang luas pada Road Map ini. Proses ini menggunakan pendekatan yang memastikan para stakeholder yang terlibat mengeksplorasi dan memprioritaskan masalah yang dihadapi secara nyata sebelum menentukan solusi relevan yang akan dijabarkan dalam rencana aksi.

1.5 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4031);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 2).
- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 Nomor 6).
- j. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- k. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 Nomor 51)
- l. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 Nomor 52)
- m. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 Nomor 31)

BAB II

Permasalahan Dan Tantangan



Proses eksplorasi dan analisa masalah oleh Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan menghasilkan pemahaman bahwa benang merah permasalahan mutu pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan adalah kesenjangan yang terjadi baik antar satuan pendidikan, antar wilayah atau antar tipologi kelompok masyarakat yang ada di penjuru kabupaten. Meskipun kesenjangan diakui dan benar-benar dirasakan oleh semua pihak, hal ini belum mendapat perhatian yang memadai. Berbagai data dan informasi yang tersedia terkait mutu seringkali tersaji secara agregat sehingga tidak selalu dapat menggambarkan keberagaman dan kesenjangan capaian dan kondisi antar satuan pendidikan, antar wilayah atau antar tipologi kelompok masyarakat. Oleh karenanya, berbagai program dan upaya berbagai pihak selama ini belum cukup fokus untuk menutup berbagai kesenjangan yang sebenarnya dapat secara signifikan mendongkrak capaian kabupaten secara kolektif.

Secara lebih rinci permasalahan prioritas yang menyebabkan kesenjangan mutu dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah guru berstatus pegawai negeri dan distribusinya yang tidak merata

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah guru khususnya guru kelas, guru agama dan guru penjaskes dari tahun ke tahun terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya guru yang telah memasuki batas usia pensiun dan karena terus bertambahnya jumlah satuan pendidikan khususnya swasta yang dikelola oleh masyarakat. Data menunjukkan jumlah satuan pendidikan swasta terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020), terdapat peningkatan yang cukup besar dalam jumlah SD dari 592 menjadi 610.

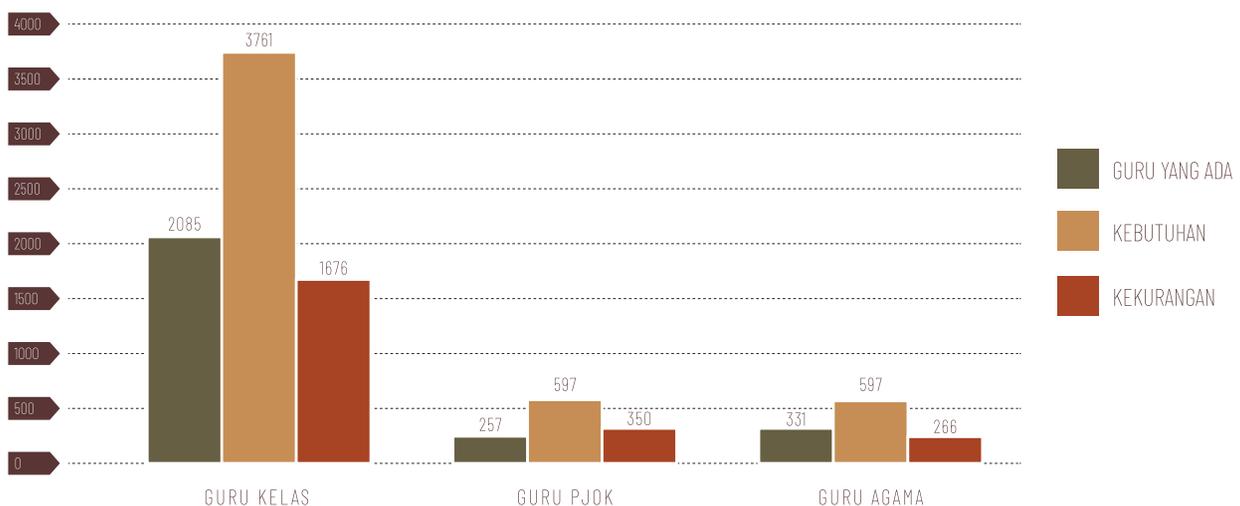
Berdasarkan pendataan dan pemetaan kebutuhan guru SD tahun 2020, Lombok Tengah masih mengalami kekurangan 1.676 guru kelas, 340 orang

guru PJOK dan 266 guru agama. Demikian juga halnya dengan guru SMP. Pada tahun 2020, untuk mata pelajaran agama, PPKn, Bahasa Indonesia, PJOK, Seni Budaya, TIK, Mulok, BP/BK masih kekurangan guru sebanyak 381 orang. Sementara untuk beberapa mata pelajaran seperti, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS terjadi kelebihan guru sebanyak 94 orang.

Bagaimana dengan data guru PAUD?

Selain terdapat kesenjangan antara jumlah guru yang dibutuhkan dengan yang tersedia, terdapat pula kesenjangan dalam hal distribusinya. Pemenuhan kebutuhan jumlah dan jenis guru lebih terpusat pada ibu kota kecamatan dan kabupaten, dan didasarkan pada jumlah siswa atau rombongan belajar namun belum mempertimbangkan hal lain seperti kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi berbagai kelompok siswa yang rentan putus sekolah.

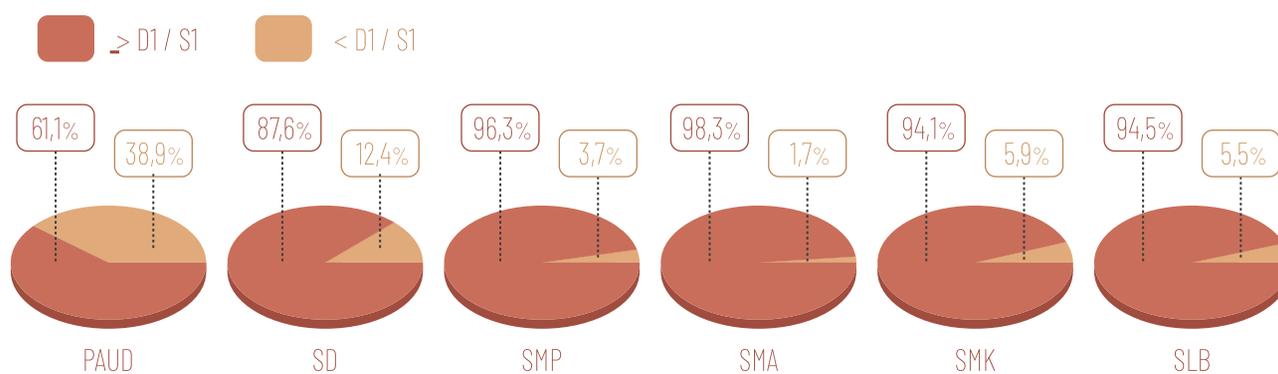
JUMLAH KEBUTUHAN DAN KEKURANGAN GURU SEKOLAH DASAR



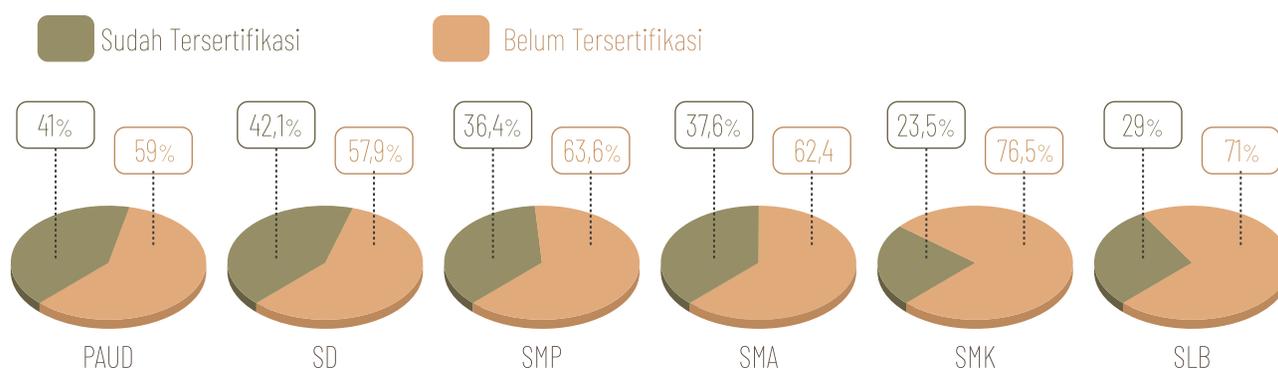
- 2) *Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata*
 Berdasarkan data Neraca Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (2019), sebagian besar guru PAUD, SD dan SMP telah memiliki kualifikasi pendidikan

D4/S1. Di jenjang PAUD, jumlah guru tanpa kualifikasi yang dibutuhkan masih cukup besar dan mendekati 40%. Jumlah guru yang tersertifikasi masih cukup jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2019, data menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru dari tingkat PAUD, SD dan SMP belum lulus sertifikasi.

KUALIFIKASI PENDIDIK

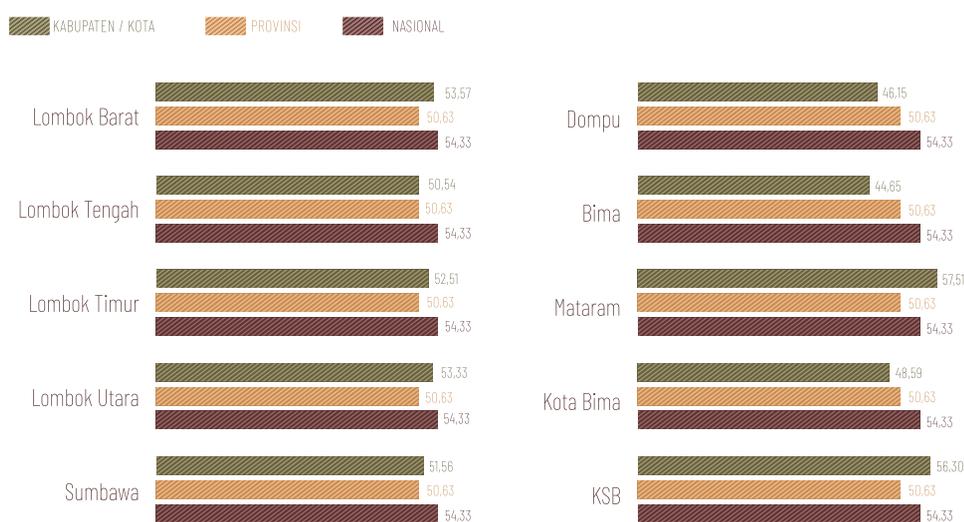


PENDIDIK TERSERTIFIKASI



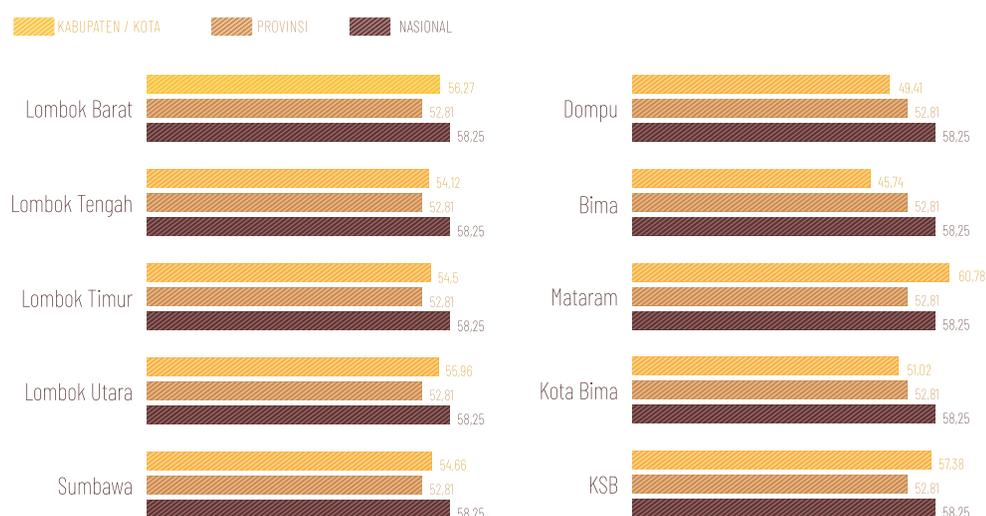
Data tentang ini sejalan dengan data hasil uji kompetensi guru tahun 2017 yang menunjukkan bahwa guru-guru SD di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 50,54. Hasil ini di bawah nilai rata-rata provinsi yaitu 50,63 dan di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 54,33.

HASIL UJI KOMPETENSI GURU SD



Sedangkan hasil uji kompetensi guru SMP menunjukkan bahwa guru-guru SMP di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 54,14. Hasil ini di atas nilai rata-rata provinsi yaitu 52,81 dan di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 58,25.

HASIL UJI KOMPETENSI GURU SMP



Data-data yang dikutip di atas menunjukkan kesenjangan antara standar yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kenyataan di kabupaten Lombok Tengah. Namun demikian, beberapa kajian termasuk dari Bank Dunia dan program INOVASI mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan dalam hal capaian siswa antara guru yang lulus uji kompetensi dan sertifikasi dengan guru yang belum. Berbagai upaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah pusat melalui LPMP atau program lain seperti PKB, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, dan program oleh akademisi dan juga mitra kunci lainnya. Sayangnya belum semua guru terjangkau oleh program peningkatan mutu tersebut. Seringkali tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan kesempatan penguatan kompetensi justru berasal dari satuan pendidikan atau wilayah yang dianggap telah cukup berhasil, sehingga pada ujungnya berbagai upaya ini belum berhasil mempersempit kesenjangan kompetensi guru di Kabupaten Lombok Tengah.

3) *Capaian kecakapan dasar literasi dan numerasi siswa yang belum merata*

Kesenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdampak langsung pada kesenjangan capaian hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil survey Indonesian National Assessment Program (INAP) 2017, dari 10 kabupaten/kota, kemampuan membaca (literasi) siswa kelas awal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada

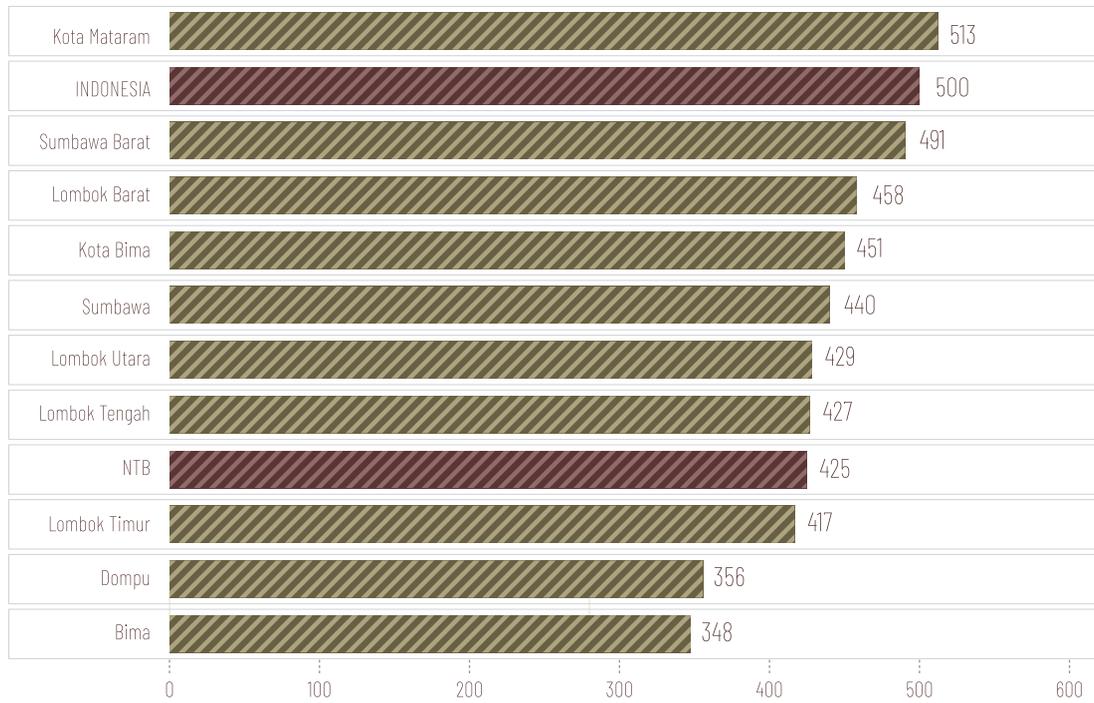
urutan ketujuh dengan skor 427. Skor ini lebih tinggi 2 point dibanding dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 73 point jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

Sedang dari 10 kabupaten/kota, kemampuan berhitung (numerasi) siswa kelas awal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan keempat dengan skor 461. Skor ini lebih tinggi 17 point dibanding dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 39 point jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

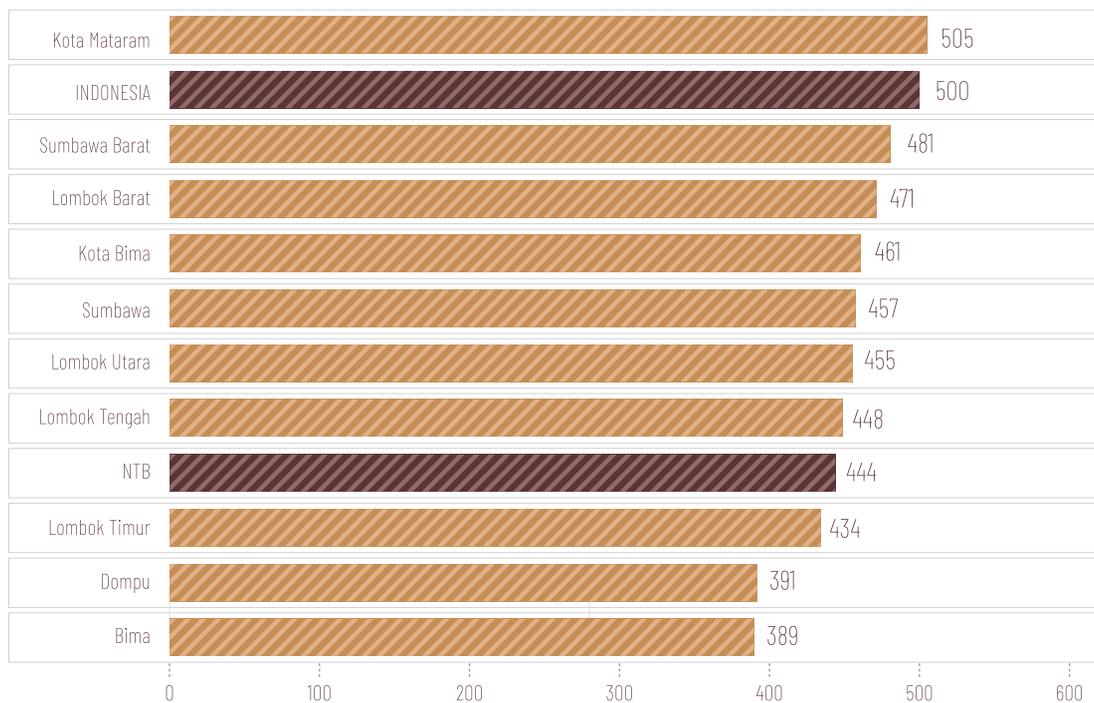
Kesenjangan terkait pencapaian kecakapan dasar ini dialami oleh sebagian besar siswa yang berada di wilayah-wilayah yang relatif sulit dijangkau dan oleh siswa-siswa dengan latar belakang dan kesulitan belajar yang berat. Belum ada kajian khusus yang menunjukkan dampak situasi pandemi terhadap capaian kecakapan dasar literasi dan numerasi. Namun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan mengindikasikan secara kuat bahwa proses Belajar Dari Rumah dengan segala permasalahannya menyebabkan siswa-siswa kehilangan kesempatan berlatih sehingga kecakapan dasar yang rendah ini mengalami penurunan lebih jauh lagi, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses pembelajaran online dan digital.

Kecakapan dasar literasi dan numerasi merupakan pondasi pembelajaran dan menjadi komponen utama dalam Asesmen Nasional yang akan diberlakukan

KEMAMPUAN LITERASI (MEMBACA) SISWA INDONESIA



KEMAMPUAN NUMERASI (MATEMATIKA) SISWA INDONESIA



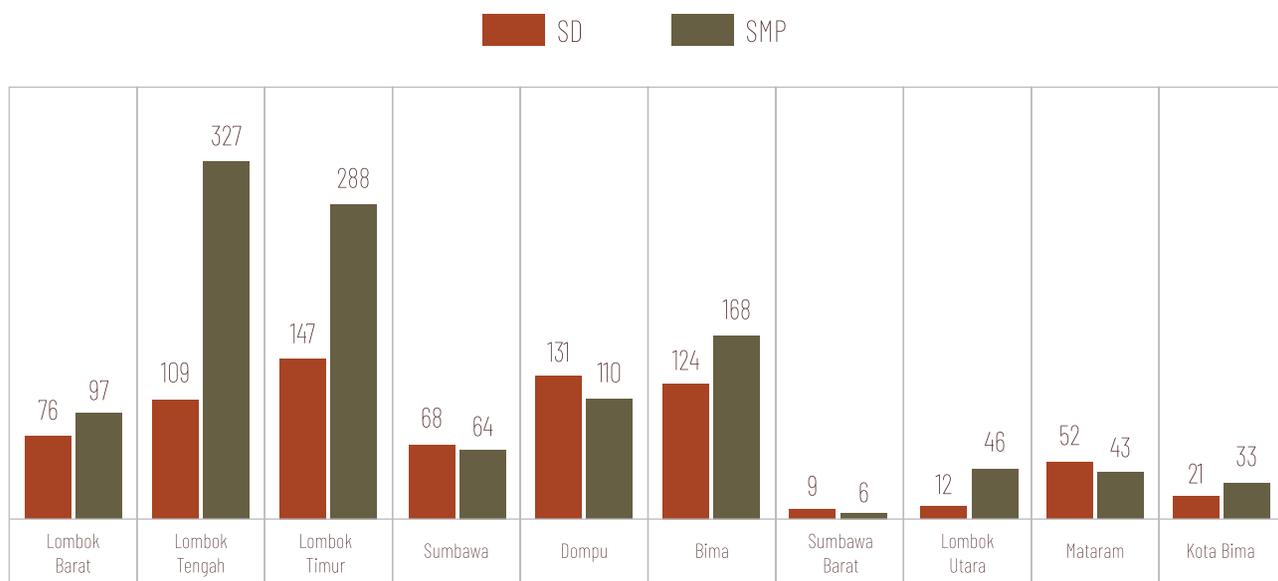
oleh Kemendikbudristek sejak 2021. Bila mutu pembelajaran dan hasil capaian literasi dan numerasi tersebut tidak segera mendapatkan penanganan, ini akan berdampak negatif pada capaian Asesmen Nasional, pada angka mengulang kelas, angka putus sekolah dan tingkat transisi sekolah khususnya dari SD ke SMP.

4) Masih tingginya angka putus sekolah SD dan SMP pada kelompok rentan

Gerakan untuk mencegah dan mengurangi siswa putus sekolah telah dilaksanakan secara sejak tahun 2013 melalui program ADONO (angka DO NoL) oleh

pemerintah provinsi serta program dan kegiatan lain oleh pemerintah kabupaten. Namun demikian, angka putus sekolah baik pada satuan pendidikan SD maupun SMP masih relatif cukup tinggi. Putus sekolah ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi lebih disebabkan oleh faktor motivasi dan lingkungan siswa serta faktor budaya seperti perkawinan dini, khusus siswa SMP, dan mengikuti mobilitas orangtua/wali. Berdasarkan neraca pendidikan tahun 2020, angka putus sekolah khususnya SMP di Lombok Tengah merupakan yang tertinggi di NTB.

ANGKA PUTUS SEKOLAH 2020



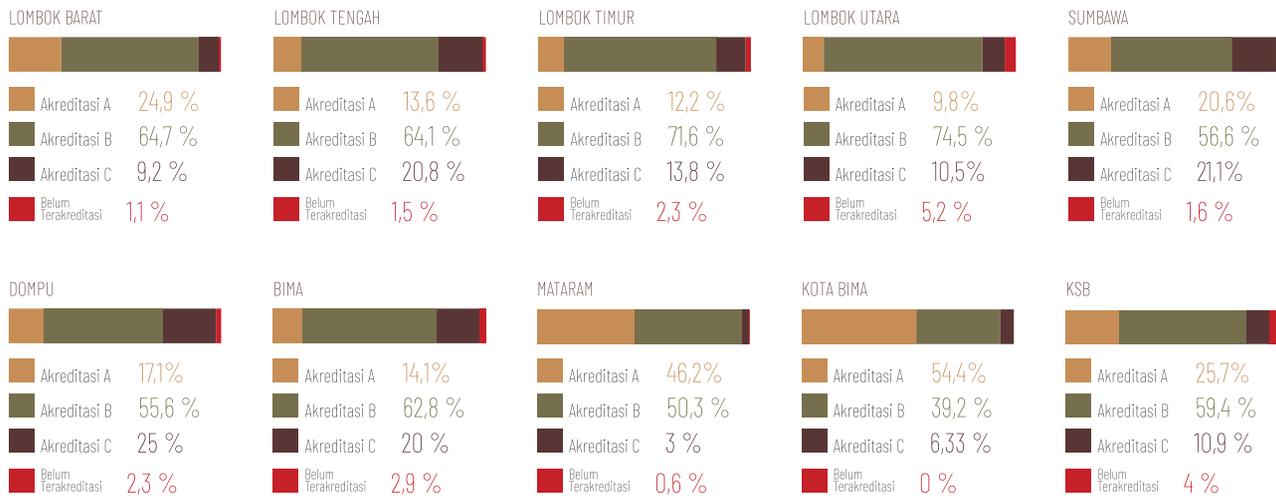
5) Masih tingginya satuan pendidikan terakreditasi C dan tidak terakreditasi

Pelaksanaan akreditasi sekolah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang penyelenggaraannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sesuai dengan tujuan tersebut, akreditasi sekolah ditetapkan sebagai indikator dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dan

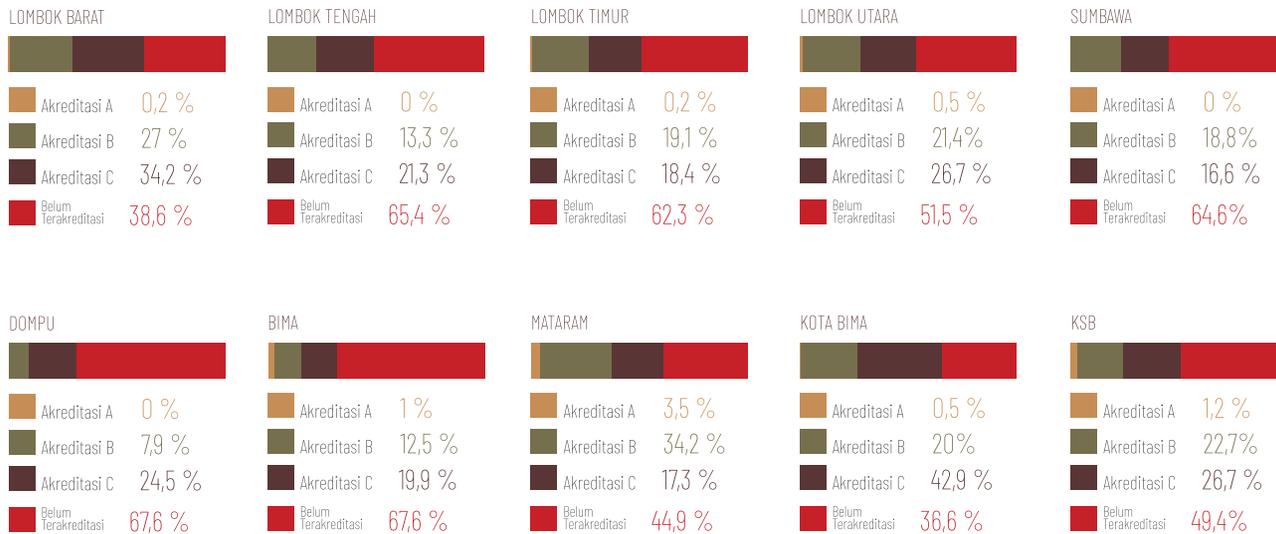
Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Sampai dengan tahun 2020, SD Terakreditasi A ditargetkan 6,02% terealisasi 5,38% dan SMP ditargetkan 11,73% terealisasi 8,37% bahkan untuk pendidikan anak usia dini dari target 1,53% terealisasi 0,0%.

Sebaliknya, prosentasi satuan pendidikan yang terakreditasi C dan tidak terakreditasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 34% untuk SMP, 23% untuk SD dan sekitar 87% untuk PAUD. Satuan pendidikan inilah yang paling mungkin mengalami kesenjangan mutu pendidikan. Oleh karenanya, kelompok ini perlu menjadi prioritas upaya peningkatan dan pemerataan mutu.

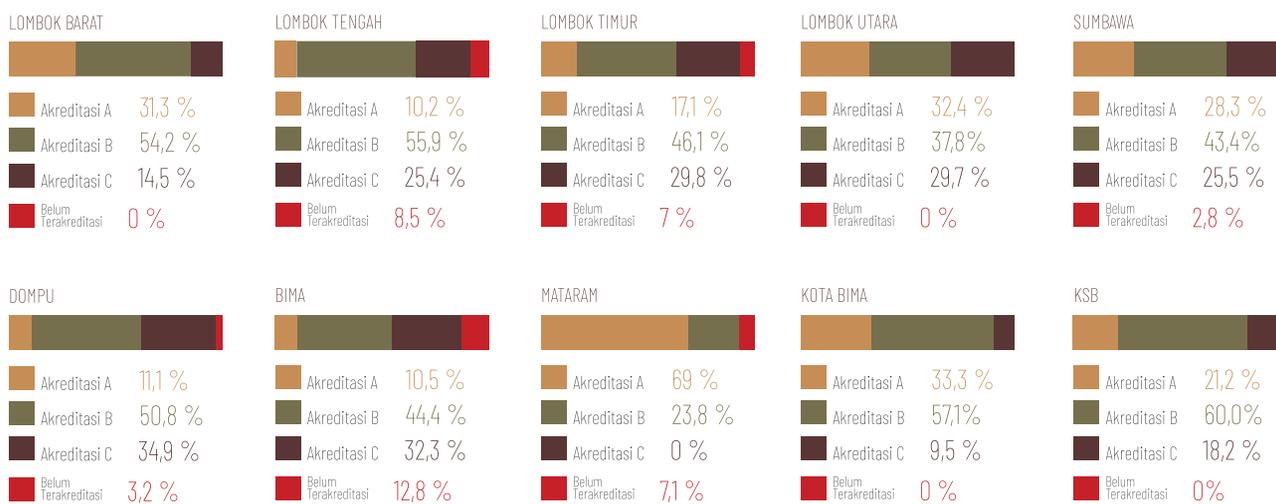
AKREDITASI SEKOLAH (SD)



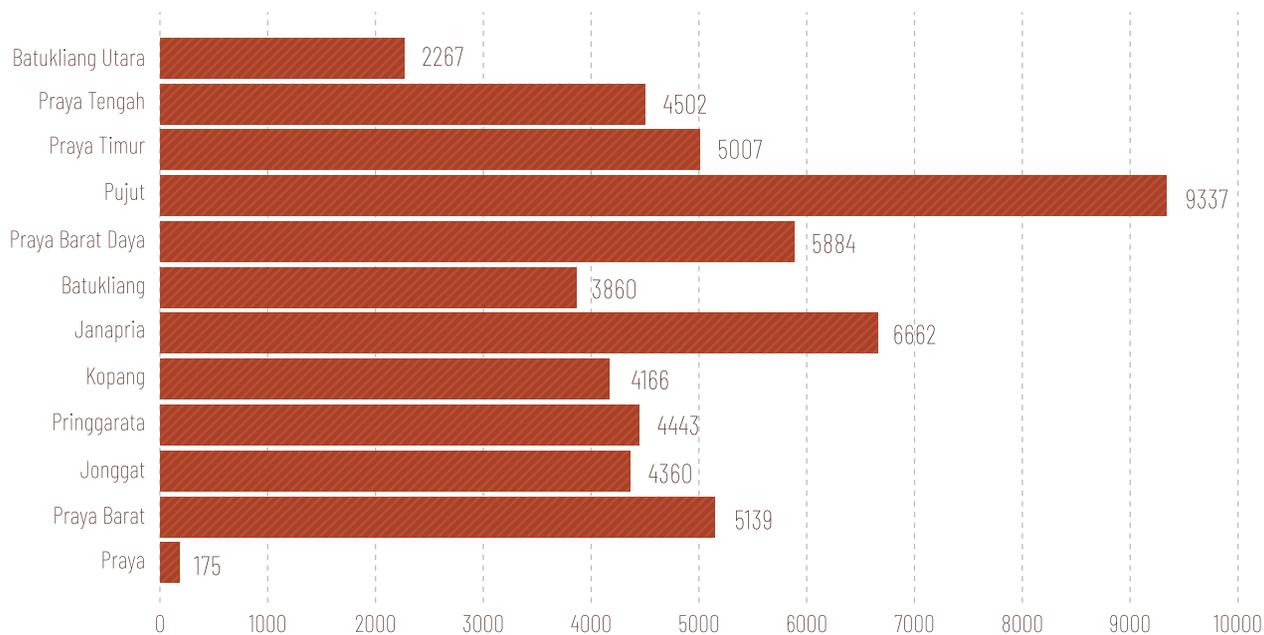
AKREDITASI SEKOLAH (PAUD)



AKREDITASI SEKOLAH (SMP)



PENDUDUK BUTA AKSARA
per 31 Desember 2020



6) Angka buta aksara masih tinggi

Seperti halnya dengan angka putus sekolah, gerakan penuntasan buta aksara telah dilaksanakan secara masif sejak tahun 2013 melalui program ABSANO (angka buta aksara nol) oleh Pemerintah Provinsi NTB dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten Lombok Tengah, namun angka buta aksara di Lombok Tengah masih cukup tinggi yakni sebanyak 55.802 jiwa. Tingginya angka buta aksara ini disebabkan karena rata-rata yang mampu dibelajarkan melalui dana APBD Kabupaten sebanyak 3.000 orang per tahun.

7) Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter

Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kompetensi abad 21. Meskipun penanaman pendidikan karakter telah dimulai sejak tahun 2018 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal namun pelaksanaannya dalam tiga tahun terakhir ini belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi program yang belum optimal dan diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah kesulitan pihak sekolah dan guru untuk melakukan penilaian penguatan pendidikan karakter terhadap siswa serta dampak perkembangan teknologi dan informasi terhadap perilaku dan interaksi individu.

Selain literasi dan numerasi, karakter dan kompetensi abad-21 adalah kecakapan pondasi yang sangat diperlukan oleh semua siswa. Kelompok-kelompok siswa dari kelompok rentan, khususnya, sangat perlu menguasai karakter Pelajar Pancasila dan kompetensi abad-21 sehingga mereka memiliki sikap dan karakter yang diperlukan untuk mempersempit kesenjangan capaian literasi dan numerasi dengan para siswa lainnya. Menyelesaikan isu pendidikan karakter akan berkontribusi mendorong percepatan pemerataan capaian hasil belajar siswa di Lombok Tengah.

8) Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum optimal

Lombok Tengah pada tahun 2012 telah mencanangkan dan mendeklarasikan sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan telah memiliki payung hukum sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah, bahkan telah memiliki Road Map pendidikan inklusif. Namun demikian, pelaksanaannya belum sesuai harapan.



Salah satu persoalan paling mendasar terkait ini adalah belum tersedianya data yang valid dan akuntabel tentang penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus atau memiliki kesulitan belajar yang berat baik yang sudah bersekolah dan yang belum tertampung di sekolah. Permasalahan lain adalah keterampilan guru dalam memberikan pembelajaran terdiferensiasi yang sesuai kebutuhan siswa. Ketersediaan guru pendamping khusus di Lombok Tengah juga masih cukup jauh dari kebutuhan sehingga seringkali guru tidak dapat membantu anak berkebutuhan khusus mengatasi kesulitan belajarnya. Dan hal ini berdampak negative terhadap motivasi belajar anak dan tingkat putus sekolah. Terlebih lagi di masa pandemi ini, terdapat kekuatiran bahwa anak dengan kebutuhan khusus dan kesulitan belajar secara perlahan akan putus sekolah bila tidak segera mendapatkan dukungan.

- 9) **Kondisi sarana prasarana belum memadai**
Berbagai ikhtiar telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi serta revitalisasi sekolah jalur by pass. Namun upaya ini belum bisa menjangkau semua dan karenanya kondisi bangunan ruang kelas baik PAUD, SD maupun SMP di berbagai wilayah masih cukup memprihatinkan.

Dari 3.889 ruang kelas SD yang ada, 914 dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang 44, rusak ringan 2.912 dan rusak berat 19 ruang.

Seperti halnya SD, dari 1.253 ruang kelas SMP yang berada dalam kondisi baik sebanyak 502, sisanya rusak ringan 743, rusak sedang 5 dan rusak berat 3 ruang.

- 10) **Belum lengkapnya data yang memadai sebagai rujukan pengembangan kebijakan dan program peningkatan dan pemerataan mutu**

Meskipun telah tersedia sistem pendataan pendidikan yang terintegrasi secara online (dapodik), tetapi data yang tersedia di Dapodik belum secara komprehensif menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Lombok Tengah, terlebih lagi kondisi kesenjangan mutu yang dialami berbagai wilayah dan kelompok tertentu. Data yang ada pada dinas pendidikan sudah lebih bisa mencerminkan tentang mutu dan kesenjangan, namun data-data tersebut belum dapat diakses secara mudah oleh berbagai pihak yang dapat membantu mengatasi isu-isu kesenjangan mutu.

Komunikasi dan publikasi data sudah mulai dilakukan melalui berbagai platform termasuk website pemerintah daerah dan diperlukan upaya lebih untuk memastikan data yang dipublikasikan digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

Isu lain yang mendasar terkait data, selain kualitas dan ketersediaannya adalah penggunaannya dalam merumuskan kebijakan, perencanaan program dan anggaran. Oleh karenanya diperlukan penguatan advokasi dan komunikasi berbasis bukti dan data sehingga benar-benar menjadi acuan dalam menyusun intervensi terkait mutu dan kesenjangan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.

KONDISI RUANG KELAS SD

Pujut	Baik : 98	RR : 392	RS : 2	RB : 1	Jumlah	493
Pringgarata	Baik : 95	RR : 190	RS : 2	RB : 0	Jumlah	287
Praya Timur	Baik : 40	RR : 211	RS : 9	RB : 9	Jumlah	269
Praya Tengah	Baik : 52	RR : 155	RS : 3	RB : 0	Jumlah	210
Praya Barat Daya	Baik : 56	RR : 200	RS : 3	RB : 0	Jumlah	259
Praya Barat	Baik : 67	RR : 285	RS : 2	RB : 0	Jumlah	354
Praya	Baik : 146	RR : 317	RS : 0	RB : 3	Jumlah	466
Kopang	Baik : 63	RR : 238	RS : 4	RB : 4	Jumlah	309
Jonggat	Baik : 93	RR : 311	RS : 11	RB : 0	Jumlah	415
Janapria	Baik : 97	RR : 209	RS : 0	RB : 0	Jumlah	306
Batukliang Utara	Baik : 69	RR : 138	RS : 7	RB : 2	Jumlah	216
Batukliang	Baik : 38	RR : 266	RS : 1	RB : 1	Jumlah	305

KONDISI RUANG KELAS SMP

Pujut	Baik : 81	RR : 82	RS : 2	RB : 2	Jumlah	167
Pringgarata	Baik : 28	RR : 33	RS : 0	RB : 0	Jumlah	61
Praya Timur	Baik : 36	RR : 60	RS : 0	RB : 0	Jumlah	96
Praya Tengah	Baik : 4	RR : 36	RS : 0	RB : 0	Jumlah	40
Praya Barat Daya	Baik : 28	RR : 43	RS : 0	RB : 0	Jumlah	71
Praya Barat	Baik : 23	RR : 74	RS : 2	RB : 1	Jumlah	100
Praya	Baik : 93	RR : 106	RS : 0	RB : 0	Jumlah	199
Kopang	Baik : 47	RR : 79	RS : 0	RB : 0	Jumlah	126
Jonggat	Baik : 78	RR : 51	RS : 0	RB : 0	Jumlah	129
Janapria	Baik : 38	RR : 41	RS : 0	RB : 0	Jumlah	79
Batukliang Utara	Baik : 9	RR : 75	RS : 1	RB : 0	Jumlah	85
Batukliang	Baik : 37	RR : 63	RS : 0	RB : 0	Jumlah	100

BAB III

Visi Misi Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan Dan Strategi



//
Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) //

3.1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, adalah: "**Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**". Untuk mendukung terwujudnya visi dimaksud maka disusun roadmap peningkatan mutu pendidikan Lombok Tengah sebagai upaya sistematis, terukur dan berkesinambungan untuk mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata di semua wilayah kabupaten Lombok Tengah.

3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diwujudkan ke dalam misi "Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul". Misi ini menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar. Misi dimaksud memberi penekanan kuat agar dilakukan upaya-upaya sistematis untuk membangun dan menyiapkan layanan pendidikan berkualitas secara merata yang inklusif sehingga semua anak dapat mengakses layanan pendidikan berkualitas. Tentu dalam jangka panjang Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mewujudkan pendidikan berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing global sebagaimana tujuan sistem pendidikan nasional.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Dinas Pendidikan menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis yang menjadi acuan tahapan pelaksanaan program prioritas dan kegiatan strategis periode 2021 - 2026 menuju terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua anak usia sekolah tanpa diskriminasi pada tahun 2026. Beberapa tujuan dan sasaran strategis dimaksud diuraikan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal di setiap satuan pendidikan dasar didukung dengan ketersediaan guru (ASN) yang cukup.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2026: tersedia 4 orang guru (ASN) di setiap SD (6 rombel), - Tahun 2026: tersedia 2 orang guru Mapel (ASN) di setiap SMP (3 rombel), - Tahun 2026: 1 orang guru (ASN) di setiap TK/PAUD
2	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran di setiap satuan Pendidikan Dasar selaras dengan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas.	Tahun 2026: kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas meningkat signifikan mencapai nilai di atas nilai rata-rata NTB
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan di setiap satuan Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2024: Partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan tingkat satuan Pendidikan meningkat signifikan, - Tahun 2024: Akses layanan Pendidikan inklusi meningkat (semua anak dapat mengakses layanan Pendidikan), - Tahun 2024: validitas, akses dan pemanfaatan data pokok Pendidikan (termasuk kompetensi literasi, numerasi dan PBS) meningkat, - Tahun 2024: angka putus sekolah menurun signifikan, - Tahun 2024: jumlah satuan Pendidikan akreditasi C dan Tidak Terkreditasi menurun signifikan.
4	Meningkatnya jumlah satuan Pendidikan Dasar berkualitas (memiliki layanan unggul) dan tersebar secara proporsional di setiap gugus, zona/rayon.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2023: jumlah komunitas belajar guru, kepala sekolah, dan pengawas yang berkualitas meningkat dan tersebar proporsional di setiap gugus, zona/rayon, - Tahun 2024: jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas berkinerja baik meningkat dan tersebar proporsional di tiap gugus, zona/rayon, - Tahun 2024: jumlah satuan Pendidikan Dasar yang terimbas/menerapkan praktik-praktik baik meningkat >>> scale out praktik baik dari berbagai program yang terbukti berhasil.
5	Meningkatnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pembelajaran literasi, numerasi dan inklusi, serta penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai local.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2023: ada kurikulum lokal jenjang Pendidikan Dasar yang cukup adaptif dan operasional untuk pembelajaran literasi, numerasi dan inklusi, serta penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai local, - Tahun 2024: Sebagian besar guru dan kepala sekolah memiliki kompetensi melakukan adaptasi dan menerapkan kurikulum adaptif (fleksibel), - Tahun 2024: jumlah satuan Pendidikan yang memiliki bahan bacaan yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran literasi dan numerasi meningkat, - Tahun 2025: capaian hasil belajar siswa meningkat signifikan terutama pada penguasaan kecakapan pondasi (literasi dan numerasi).

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan baik di level strategis tingkat kabupaten maupun kebijakan di level operasional tingkat satuan Pendidikan

Dasar. Disamping itu, harmonisasi arah kebijakan pusat dan daerah akan meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga akan memudahkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis dimaksud.

NO	Arah Kebijakan	Strategi Kunci
1	Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan guru di satuan Pendidikan Dasar yang masih sangat kekurangan guru (ASN)	Diterjemahkan ke dalam satu strategi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Menguatkan program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas secara berkelanjutan berbasis komunitas guru, kepala sekolah, dan pengawas (KKG, K3S, KKPS)	
3	Mendorong efektifitas sistem tata kelola pendidikan secara partisipatif, kolaboratif, transparan dan akuntabel	Diterjemahkan ke dalam satu strategi peningkatan kualitas tata kelola dan pemerataan mutu layanan Pendidikan.
4	Mendorong pengembangan program strategis dan kegiatan prioritas sektor pendidikan berbasis data atau masalah	
5	Mendorong pemerataan mutu layanan Pendidikan yang inklusif di setiap satuan Pendidikan Dasar	
6	Menguatkan pengembangan muatan kurikulum berbasis kebutuhan dan penguatan karakter peserta didik	Diterjemahkan ke dalam strategi penguatan kurikulum berbasis kebutuhan dan penguatan karakter peserta didik

BAB IV

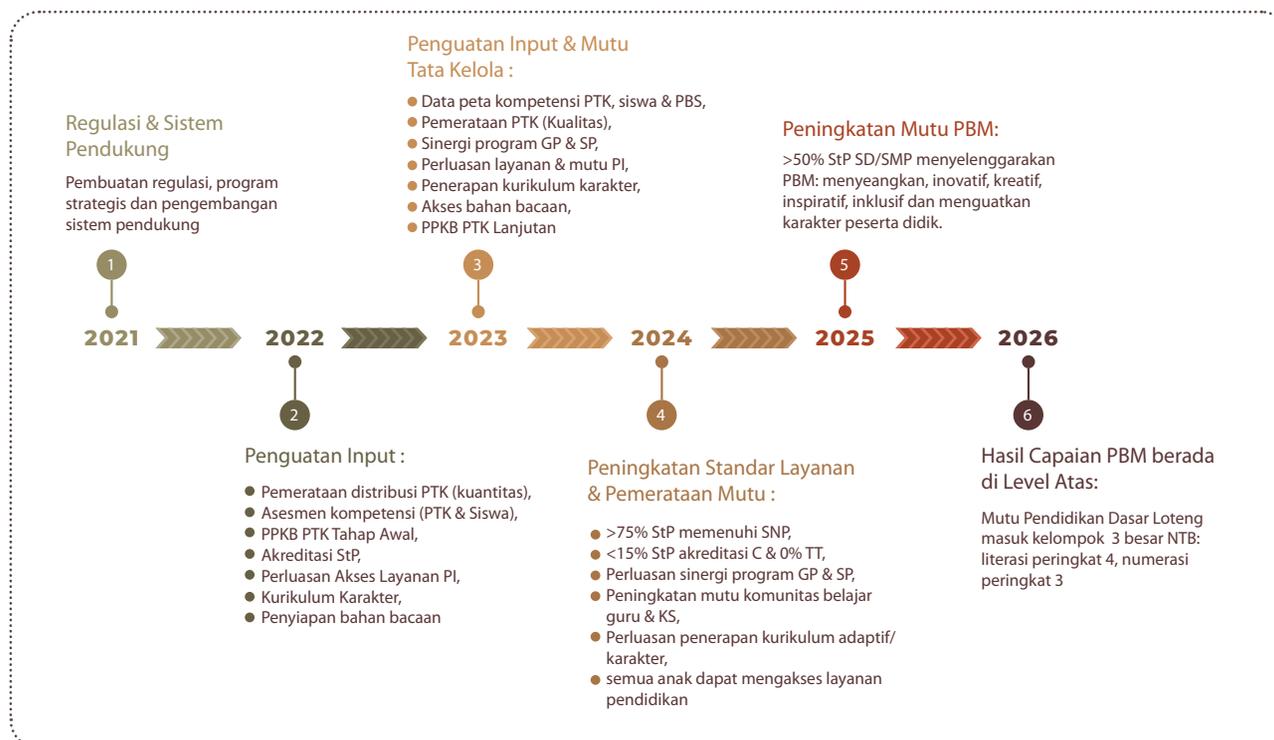
Rencana Aksi



Dalam rangka mewujudkan Pendidikan Lombok Tengah yang berkualitas, dilakukan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam beberapa program prioritas yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 2021 - 2026. Secara umum langkah-langkah dimaksud dituangkan dalam 3 strategi kunci, yaitu:

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pemerataan mutu layanan pendidikan
3. Penguatan kurikulum berbasis kebutuhan dan penguatan karakter siswa.

Arah dan tahapan - tahapan strategis menuju tahun 2026 digambarkan secara sistematis dalam sebagai berikut.



Bagaimana tiga strategi kunci akan berkontribusi ke tahapan dan mendukung pencapaian sasaran di masing-masing tahapan dimaksud. Diuraikan lebih rinci secara berurutan sebagai berikut.

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Pada strategi pertama ini ada dua sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu: a) pada tahun 2026, tersedia sekurang-kurangnya 4 guru (ASN) di setiap satuan

pendidikan jenjang SD yang memiliki 6 rombel, 2 guru (ASN) per mata pelajaran di setiap satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki rombel 3, dan b) pada 2026, hasil asesmen kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas Kabupaten Lombok Tengah mencapai nilai rata-rata di atas rata-rata Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan strategi ini diterjemahkan ke dalam beberapa program strategis dan kegiatan prioritas yang diuraikan lebih detail dalam tabel berikut.

Program Strategis	Kegiatan Prioritas	Tahapan/Waktu
Pengembangan sistem penataan dan pemerataan guru secara efektif	Analisis kebutuhan guru per satuan pendidikan dasar	2021 - 2022
	Penyusunan strategi penataan dan pemerataan guru dalam jangka panjang	2021 - 2023
	Distribusi dan penempatan guru di satuan pendidikan yang kekurangan guru	2022 - 2024
Pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas secara berjenjang dan berkelanjutan	Asesmen kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas, serta siswa	2022 - 2023
	Penyusunan strategi jangka panjang pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas	2022 - 2023
	Pendidikan dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas sesuai kebutuhan secara berkelanjutan berbasis KKG, K3S, KKPS	2022 - 2026
	Penyusunan sistem penilaian kinerja dan promosi guru, kepala sekolah dan pengawas yang efektif dan akuntabel	2022 - 2023

Beberapa kegiatan terkait lainnya dan mendukung pencapaian dua sasaran di atas tidak dicantumkan sebagai kegiatan prioritas, namun akan masuk dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan bila dipandang dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pencapaian sasaran dimaksud.

2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pemerataan mutu layanan pendidikan

Strategi ini meliputi dua dimensi utama, yaitu peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, dan pemerataan mutu layanan pendidikan khususnya pada aspek peningkatan mutu proses pembelajaran di kelas. Mengacu pada beberapa fakta tentang satuan pendidikan yang berkembang signifikan dan memiliki keunggulan dari satuan pendidikan lainnya, sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan tersebut. Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif, kreatif dalam memanfaatkan potensi/ peluang, memiliki inisiatif untuk melakukan inovasi, dan memfasilitasi tumbuhnya iklim partisipasi dari pemangku kepentingan tingkat satuan pendidikan, akan mendorong perkembangan satuan pendidikan yang dipimpinnya berkembang dan unggul dari satuan pendidikan lainnya. Sementara itu kualitas proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi

oleh kompetensi, kreatifitas dan inovasi guru yang didukung oleh kebijakan kepala sekolah yang sesuai. Strategi 2 ini memfasilitasi terwujudnya sinergi antara dua aktor kunci di tingkat satuan pendidikan tersebut, dan mendorong dukungan kebijakan yang relevan dari Dinas Pendidikan.

Sasaran strategis pada dimensi peningkatan kualitas tata kelola pendidikan meliputi beberapa poin berikut:

- Tahun 2024: Partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan tingkat satuan Pendidikan meningkat signifikan,
- Tahun 2024: Akses layanan Pendidikan inklusi meningkat (semua anak dapat mengakses layanan Pendidikan),
- Tahun 2024: validitas, akses dan pemanfaatan data pokok Pendidikan (termasuk kompetensi literasi, numerasi dan PBS) meningkat,
- Tahun 2024: angka putus sekolah menurun signifikan,
- Tahun 2024: jumlah satuan Pendidikan akreditasi C dan Tidak Terakreditasi menurun signifikan.

Untuk mencapai beberapa sasaran dimaksud, disusun beberapa program strategis dan kegiatan prioritas sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Program Strategis	Kegiatan Prioritas	Tahapan/Waktu
<i>Pengembangan kualitas tata kelola (manajemen) layanan pendidikan dasar</i>	Pengembangan perangkat sistem informasi data terintegrasi dan dapat diakses secara cepat dan akurat	2021 – 2022
	Peningkatan kompetensi tim pengelola data pendidikan	2022 - 2023
	Asistensi peningkatan kualitas proses perencanaan dan pengelolaan program tingkat satuan pendidikan secara partisipatif dan kolaboratif	2022 – 2024
	Pengembangan sistem pemetaan mutu pendidikan secara efektif dan partisipatif	2022 – 2024
	Pengembangan mekanisme pengelolaan data pengawasan dan penyampaian umpan balik secara efektif antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan	2022 – 2023
	Penyiapan BOSDA jenjang bagi siswa SD dan SMP, khususnya kelompok siswa potensial putus sekolah dan menghadapi masalah pembiayaan pendidikan	2022 – 2024
	Pelatihan peningkatan kompetensi kepemimpinan dan managerial pengelolaan satuan pendidikan bagi kepala sekolah, dan peningkatan kompetensi supervisi bagi pengawas	2022 – 2023
<i>Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program pendidikan secara efektif</i>	Pengembangan perangkat sistem dan mekanisme monev program secara efektif	2021 – 2022
	Peningkatan kompetensi tim monev tentang strategi penyusunan indikator, pengelolaan dan analisis data, serta penilain hasil/capaian kegiatan	2022 – 2023

Pada dimensi pemerataan mutu layanan pendidikan, sasaran utama adalah terwujudnya beberapa satuan pendidikan unggul (berdasarkan beberapa kriteria) dan tersebar merata di tiap gugus, zona/rayon. Beberapa kriteria unggul, antara lain:

- Lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif,
- Pengelolaan program dan anggaran yang efektif dan akuntabel,
- Kepemimpinan terbuka yang memfasilitasi tumbuhnya kreatifitas, partisipasi dan

- kolaborasi antara pemangku kepentingan, Capaian hasil pembelajaran di atas nilai rata-rata provinsi NTB, dan selaras dengan penguatan karakter peserta didik.

Untuk pencapaian sasaran dimaksud, dirumuskan beberapa program strategis dan kegiatan prioritas yang secara langsung yang memfasilitasi pencapaian sasaran dimaksud. Beberapa program dan kegiatan dimaksud diuraikan dalam tabel berikut.

Program Strategis	Kegiatan Prioritas	Tahapan/Waktu
<i>Penguatan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</i>	Pengembangan promosi khusus bagi guru dan kepala sekolah berkinerja baik yang terintegrasi dengan strategi pemerataan guru dan mutu pendidikan	2022 - 2023
	Pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas berkinerja baik	2024 - 2026
	Perluasan penerapan/adaptasi praktik - praktik baik dari beberapa program pendidikan yang relevan secara kolaboratif (multi pihak)	2022 - 2025
	Peningkatan kualitas pengelolaan dan program KKG, K3S dan KKPS	2022 - 2024
<i>Peningkatan kualitas tata kelola (manajemen) program pendidikan</i>	Penguatan sinergi dan kolaborasi program strategis kabupaten dengan program prioritas Kemendikbud	2022 - 2026

Arah kurikulum ke depan

- Perkembangan fleksibel
- Kurikulum berdasarkan kompetensi
- Kurikulum sebagai kerangka/ menu
- Fokus kepada keterampilan lunak (soft skill) dan pengembangan karakter
- Pelatihan vokasi dipimpin oleh industri

3. Penguatan kurikulum berbasis kebutuhan dan karakter siswa

Penguatan kurikulum berbasis kebutuhan dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik perlu dilakukan mengingat bahwa tuntutan penguasaan kompetensi abad 21/kecakapan 4C (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation) mensyaratkan penguasaan kecakapan fondasi (literasi, numerasi) dan karakter yang kuat pada setiap peserta didik khususnya jenjang pendidikan dasar. Disamping itu, pandemi covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan perubahan signifikan pada situasi, lingkungan, dan kebutuhan pembelajaran yang berimplikasi pada perubahan/penyesuaian kurikulum dan strategi pelaksanaan proses pembelajaran.

Sasaran strategis pengembangan kurikulum adalah tersedia kurikulum yang adaptif berbasis kebutuhan pembelajaran literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik yang inklusif. Untuk pencapaian sasaran tersebut, dilakukan beberapa program strategis dan kegiatan prioritas secara bertahap yang dijelaskan pada tabel berikut.

Program Strategis	Kegiatan Prioritas	Tahapan/Waktu
<i>Penguatan kurikulum berbasis kebutuhan dan penguatan karakter peserta didik</i>	Pengembangan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan dan nilai – nilai lokal	2022 – 2023
	Pengadaan dan perluasan bahan bacaan sesuai kebutuhan pembelajaran literasi, numerasi, dan pendidikan inklusi	2022 – 2024
<i>Peningkatan kualitas tata kelola (manajemen) program pendidikan</i>	Penguatan pemahaman pemangku kepentingan kunci tentang arah pengembangan kurikulum	2021 – 2022
<i>Pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas</i>	Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam penyusunan kurikulum dan penerapan kurikulum adaptif yang inklusif	2022 – 2024

Uraian lebih detail sasaran, program, jadwal pelaksanaan dan pagu indikatif (anggaran) setiap program dapat dilihat pada matriks terlampir.

BAB V

Monitoring Dan Evaluasi



Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, hasilnya terukur dan akuntabel, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Pelaksanaan monev haruslah memperhatikan prinsip-prinsip: a) berorientasi pada tujuan, b) mengacu pada kriteria keberhasilan yang jelas dan terukur, c) mengacu pada asas manfaat, dan, d) dilakukan secara objektif. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Hasil monev merupakan informasi yang sangat penting karena akan menjadi acuan bagi penanggung jawab program untuk mengambil keputusan. Namun demikian, monev harus dilakukan oleh tim yang profesional, didukung instrumen yang baku sehingga diperoleh data yang obyektif. Data obyektif kemudian dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat pula.

1. Tujuan dan Metode

Secara umum tujuan monev pelaksanaan roadmap ini adalah untuk memastikan proses dan implementasi program/kegiatan dilakukan secara efektif, menilai ketercapaian tujuan dan sasaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menyusun rekomendasi umpan balik yang tepat, baik yang sifatnya penyesuaian strategi maupun perumusan kebijakan tindak lanjut.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, digunakan beberapa pendekatan secara kombinasi: kuisioner, wawancara, FGD, dan observasi, melalui beberapa kegiatan berikut:

- Studi dokumen data
- Asesmen kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan siswa
- Survei lingkungan belajar dan karakter peserta didik
- Observasi kelas dan proses pembelajaran
- Survei kualitas layanan Pendidikan
- Wawancara mendalam pemangku kepentingan kunci

2. Periodisasi dan Indikator Kunci

Monev pelaksanaan Roadmap ini dibagi dalam 3 periode, yaitu: *pertama* periode penyiapan regulasi, sistem pendukung dan peningkatan input (2021 – 2022), *kedua*, periode peningkatan standar pengelolaan sumber daya dan mutu layanan (2023 – 2024), dan *ketiga*, periode pemerataan mutu dan peningkatan capaian proses pembelajaran (2025 – 2026). Pada setiap periode terdapat indikator kunci sebagai alat ukur terlaksananya program dan kegiatan prioritas secara efektif, serta tercapainya sasaran pada periode dimaksud. Beberapa indikator kunci pada setiap periode dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

Periode Pertama, 2021 – 2022

Indikator Kunci

1. Matriks jumlah satuan pendidikan yang kekurangan guru kelas/mata pelajaran (akhir 2021)
2. Rumusan strategi jangka panjang rencana program pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas (awal 2022)
3. Data awal tingkat kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan siswa (akhir 2022)
4. Rancangan awal perangkat system informasi data Pendidikan terintegrasi dan dapat diakses cepat dan valid (akhir 2022)
5. Jumlah satuan pendidikan yang kekurangan guru turun signifikan, minimal turun 15% (akhir 2022)
6. Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi meningkat, minimal naik 10% (akhir 2022)

Pada periode kedua diharapkan telah terjadi perkembangan yang menunjukkan bahwa output dari pelaksanaan kegiatan pada periode sebelumnya sudah mulai bekerja dan memberi dampak. Oleh karena itu indikator kunci pada tahapan ini sudah mengarah pada penilaian capaian hasil antara. Berikut beberapa sasaran kunci periode kedua.

Periode Kedua, 2023 – 2024

Indikator Kunci

7. Ada kurikulum adaptif berbasis kebutuhan pembejaran literasi, numerasi dasar dan penguatan karakter peserta didik (Akhir 2023)
8. Jumlah komunitas belajar guru, kepala sekolah, dan pengawas (KKG, K3S, KKPS) berkualitas meningkat dan tersebar proporsional, minimal satu di setiap gugus, zona/rayon (akhir 2023)
9. Tersedia data valid nilai kompetensi literasi, numerasi dan PBS semua siswa jenjang SD/MI yang dapat diakses dengan cepat dan akurat (akhir 2024)
10. Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas berkinerja baik meningkat dan tersebar proporsional di tiap gugus, zona/rayon, minimal mencapai 15% (akhir 2024)
11. Jumlah satuan Pendidikan Dasar yang terimbas/menerapkan praktik-praktik baik pembelajaran meningkat, minimal mencapai 50% (akhir 2024)

Pada periode ketiga, monev sudah mengarah pada capaian sasaran strategis yang secara langsung mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua anak usia sekolah tanpa diskriminasi pada tahun 2026 di kabupaten Lombok Tengah.

Periode Ketiga, 2025 – 2026

Indikator Kunci

12. Jumlah guru yang mampu mengembangkan dan menerapkan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan dan penguatan karakter siswa meningkat, minimal mencapai 25% (awal 2025)
13. Lebih dari 50% Satuan Pendidikan menyelenggarakan PBM: menyenangkan, inovatif, kreatif, inklusif, dan menguatkan karakter peserta didik (akhir 2025)
14. Capaian hasil belajar siswa jenjang pendidikan dasar meningkat signifikan, khususnya nilai rata-rata kompetensi literasi mencapai minimal ranking 4, dan nilai rata-rata kompetensi numerasi mencapai minimal ranking 3 dari 10 kabupaten/kota di NTB (akhir 2026).

Beberapa indikator lainnya yang merupakan bagian dari prasyarat tercapainya sasaran strategis yang diukur oleh masing-masing indikator kunci di atas, tetap akan menjadi perhatian monev pada setiap periode, meskipun tidak disebutkan dalam rincian 14 indikator kunci di atas.

3. Tahapan Monev

Pelaksanaan monev pada tiap periode akan dilakukan secara sistematis agar dalam pelaksanaan bisa berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan monev dimaksud meliputi tiga tahapan utama.

a) Persiapan

Tahap ini meliputi beberapa kegiatan: penyiapan instrument, penyiapan tim, dan penetapan jadwal pelaksanaan. Ada dua komponen penting pada tahapan ini yaitu: memastikan kesiapan instrument untuk setiap pendekatan/metode monev yang akan dilakukan karena setiap metode memerlukan instrument yang berbeda dan alat pendukungnya. Komponen kedua adalah kesiapan tim monev terutama pemahaman terhadap isi instrument dan strategi penggunaan setiap instrument. Tim monev sebaiknya terdiri dari internal Dinas Pendidikan dan pihak eksternal pemangku kepentingan terkait. Agar tim monev dapat memahami secara tepat semua instrument dan strategi yang digunakan, maka perlu dilakukan pelatihan sehingga setiap person mencapai standar pemahaman dan keterampilan yang relative sama.

b) Pelaksanaan

Pada tahapan ini semua metode yang sesuai akan dikombinasikan agar semua informasi dan data yang diperlukan dapat diperoleh secara maksimal dan validitasnya terjamin. Untuk periode awal/pertama 2021 – 2022, pelaksanaan monev fokus pada ketersediaan data awal (baseline) melalui beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

- Studi dokumen tentang dokumen analisis kebutuhan guru per satuan Pendidikan, dan bila belum ada maka dilakukan survei kebutuhan guru di tiap satuan Pendidikan,
- Studi dokumen tentang ketersediaan kebijakan, sistem pendukung, dan dokumen yang lainnya yang relevan dengan pelaksanaan roadmap,
- Studi dokumen data awal hasil asesmen kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan siswa. Bila data belum ada, maka dilakukan asesmen kompetensi menggunakan instrument dan metode yang sesuai,
- Studi dokumen terhadap data awal jumlah PTK yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi, dan diakhir tahun 2022 dilakukan survei untuk memastikan apakah jumlahnya meningkat sesuai sasaran dalam periode tersebut.

Pada periode kedua 2023 – 2024, dilakukan beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

- Studi dokumen tentang ketersediaan kurikulum adaptif, dan survei beberapa guru yang telah mampu

mengembangkan dan menerapkannya,

- Survei jumlah komunitas belajar guru, kepala sekolah dan pengawas (KKG, K3S, dan KKPS) yang memiliki kegiatan reguler, berkesinambungan dan memenuhi kebutuhan belajar guru untuk mendukung peningkatan kompetensi pembelajaran di kelas,
- Studi dokumen ketersediaan system atau penerapan system informasi data Pendidikan yang dapat diakses secara cepat dan akurat. Sistem dapat menyajikan data tingkat kompetensi literasi, numerasi dan PBS anak yang mudah diakses para pemangku kepentingan,
- Studi dokumen data satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusi dan pengamatan proses pembelajaran di kelas apakah sudah dilakukan secara inklusif,
- Studi dokumen tentang tingkat kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Bila data belum tersedia, maka dilakukan penilaian kinerja guru menggunakan metode dan instrument yang sesuai,
- Survei jumlah satuan Pendidikan yang terkait ketersediaan bahan bacaan/buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa,
- Survei jumlah satuan Pendidikan yang menerapkan praktik-praktik baik secara kolaboratif (multi pihak) hasil dari beberapa program Pendidikan yang terbukti memberi dampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa.

Pelaksanaan monev periode 2025 – 2026 diharapkan dapat menjelaskan apakah roadmap telah dilaksanakan secara konsisten dan mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Terkait hal tersebut maka dilakukan tiga kegiatan pokok berikut:

- Survei kecukupan guru per satuan Pendidikan, diharapkan terdapat sekurang-kurangnya 4 guru kelas (ASN) di setiap satuan Pendidikan jenjang SD yang memiliki 6 rombel, dan sekurang-kurangnya 2 guru maple (ASN) untuk setiap mata pelajaran yang memiliki 3 rombel di jenjang SMP,
- Survei lingkungan belajar di setiap satuan Pendidikan dan pengamatan proses pembelajaran di kelas apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif, inklusif dan menguatkan karakter peserta didik,
- Survei tingkat kepuasan orang tua/wali, komite, siswa dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan tentang kualitas layanan di tingkat satuan Pendidikan,
- Asesmen kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan siswa.

c) Analisis dan umpan-balik

Tahapan ini sangat penting mengingat bahwa meskipun proses pengumpulan data dan informasi telah dilakukan secara efektif, namun bila tidak ditindaklanjuti dengan respon atau umpan balik yang tepat, maka hasil monev tidak akan memberi banyak manfaat. Monev pada periode awal tentu untuk memastikan adanya data awal (baseline) dan semua perangkat sistem pendukung yang akan menjadi informasi penting bagi pelaksanaan roadmap di tahap awal, serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan roadmap tahap kedua. Demikian pula hasil monev periode kedua menjadi bahan masukan bagi peningkatan efektifitas pelaksanaan roadmap tahap ketiga (akhir).

Analisis data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing periode monev tersebut menjadi dasar untuk menentukan umpan balik yang diperlukan pada setiap tahapan dan program/kegiatan yang sedang berjalan. Monev untuk periode pertama dan kedua sangat memungkinkan lahirnya umpan balik dalam beberapa bentuk:

- Penyusunan kebijakan baru (Bupati, Kepala Dinas, dan Kepala Sekolah) yang menjadi acuan pelaksanaan beberapa kegiatan tertentu,
- Perubahan strategi secara terbatas atau lebih luas,
- Perubahan/rasionalisasi sasaran strategis/akhir bila pelaksanaan roadmap dalam tahapan pertama dan kedua tidak mencapai sasaran yang diharapkan,
- Pada tingkat yang lebih strategis bisa berupa lahirnya suatu keputusan untuk tidak melanjutkan kegiatan tertentu atau harus dilakukan penggantian program/kegiatan yang bisa mendukung pencapaian sasaran strategis.

Monev periode ketiga lebih fokus pada hasil akhir dan dampak yang terjadi, termasuk mengidentifikasi capaian lainnya yang juga berkontribusi pada tercapainya sasaran strategis di tahun 2026. Hasil monev periode ketiga ini akan bermuara kepada lahirnya rekomendasi dan tentu tidak lagi hanya pada adaptasi strategi, tapi rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil yang telah dicapai.

LAMPIRAN

BAB IV

No	Tujuan	Sasaran Strategis USULAN	Kondisi Awal (2020)	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Kondisi Akhir)	Rencana Aksi	Program
1	Terselenggaranya proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan dasar dengan didukung oleh ketersediaan guru (PNS) yang mencukupi	1. Tahun 2026 semua SD terpenuhi kebutuhan guru kelasnya	94,90	Persen	95	97	98	99	100	100	1) Pendataan dan pemetaan untuk pemenuhan kebutuhan guru pada satuan pendidikan, PAUD,SD dan SMP	Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan
		2. Tahun 2026 100% SD terpenuhi kebutuhan guru mapel agama	48,50	Persen	55	65	72	81	92	100	2) Distribusi dan pemerataan guru PNS pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP	
		3. Tahun 2026 100% SD terpenuhi kebutuhan guru mapel mapel olahraga	59,16	Persen	65	69	81	89	95	100	3) Pengusulan formasi CPNS/ PPPK	
		4. Tahun 2022 semua satuan pendidikan SMP terpenuhi kebutuhan guru mapel sesuai struktur kurikulum 2013	1.012	orang	-	184	-	-	-	-	1.196	
2	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran di setiap satuan Pendidikan Dasar selaras dengan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas.	Tahun 2026: Rerata Nilai Uji Kompetensi Guru mencapai peringkat 4 besar di NTB	7	Peringkat	7	7	6	6	5	4	Melaksanakan diklat peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas.	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Tujuan	Sasaran Strategis USULAN	Kondisi Awal (2020)	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Kondisi Akhir)	Rencana Aksi	Program
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di setiap satuan Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas	<p>1. Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan pada tahun 2024</p> <p>2. Tahun 2024 semua anak berkebutuhan khusus memperoleh akses pendidikan sesuai kebutuhan</p> <p>3. Tahun 2024: angka putus SD 0,00%</p> <p>4. Tahun 2024: angka putus SMP 0,00%</p>	3	Lembaga	5	0	1	1	1	8	<p>1) Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan BUMN/ BUMD/Organisasi nonpemerintah</p> <p>1) Peningkatan kompetensi guru kelas melalui program Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT)</p> <p>2) Pemberdayaan peran dan fungsi guru yang memiliki kemampuan KKT menjadi guru pendamping/guru kunjung</p> <p>3) Pembentukan gugus Pendidikan Inklusif</p> <p>4) Pendataan Profil Belajar Siswa pada satuan pendidikan SD dan SMP</p> <p>5) Penyediaan sarana dan fasilitas belajar bagi siswa ABK SD dan SMP</p> <p>1) Pendataan siswa rentan putus sekolah dan putus sekolah</p> <p>2) Sosialisasi pendidikan keluarga dan pencegahan perkawinan dini bagi siswa SMP</p> <p>3) Penyediaan dana BOSDA bagi siswa SD dan SMP</p>	Pengelolaan Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran Strategis USULAN	Kondisi Awal (2020)	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Kondisi Akhir)	Rencana Aksi	Program
		5. Tahun 2025: 75 persen satuan Pendidikan PAUD terakreditasi	34,6	Persen	40,5	50,5	60,5	70,5	75	75	1) Penguatan kapasitas Satuan pendidikan melalui pendampingan oleh pengawas pembina untuk memenuhi 4 indicator utama penilaian akreditasi meliputi, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen pengelolaan sekolah	
		6. Tahun 2025: semua satuan Pendidikan SD terakreditasi	52,04	Persen	61,63	71,22	84,04	92,02	100	100		
		7. Tahun 2025: semua satuan Pendidikan SMP terakreditasi	60,10	Persen	68,08	76,06	80,81	92,02	100	100		
4	Meningkatnya jumlah satuan Pendidikan Dasar berkualitas (memiliki layanan unggul) dan tersebar secara proporsional di setiap gugus, zona/rayon	1. Tahun 2023: 70 persen Gugus/ KKG, MGMP menerapkan pembelajaran daring	4	Persen	4	10	12	17	22	70	1) Peningkatan kapasitas KKG/ Gugus dan MGMP 2) Uji coba KKG online	Pengelolaan Pendidikan
		2. Tahun 2024: jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas berkinerja baik meningkat dan tersebar proporsional di tiap gugus, zona/rayon									3) Peningkatan peran dan fungsi pengawas sekolah	Pengelolaan Pendidikan
		3. Tahun 2024: 50% lebih satuan Pendidikan Dasar yang terimbas/ menerapkan praktik-praktik baik dari berbagai program yang terbukti berhasil.	21,00	Persen	21,20	25,5	32,5	41,5	47,20	50,50	4) Replikasi praktik-praktik baik dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada sekolah lain	Pengelolaan Pendidikan
		4. Tahun 2025 terdapat satu SD dan SMP unggulan di setiap kecamatan	-	Sekolah	-	2	2	2	2	2	5) Penetapan SD/SMP sebagai sekolah unggulan	
		5. Tahun 2025 regrouping sekolah yg jumlah siswanya kurang dari 60 orang	-	Sekolah	-	2	2	2	2	2	6) Pendataan dan pemetaan sekolah calon sasaran regrouping	

No	Tujuan	Sasaran Strategis USULAN	Kondisi Awal (2020)	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Kondisi Akhir)	Rencana Aksi	Program
5	Meningkatnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pembelajaran literasi, numerasi dan inklusi, serta penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai local	<p>1. Tahun 2023: tersusun kurikulum mutan lokal jenjang Pendidikan Dasar yang adaptif dan operasional untuk pembelajaran literasi, numerasi dan inklusi, serta penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai local</p> <p>2. Tahun 2024: 80% guru dan kepala sekolah memiliki kompetensi melakukan adaptasi dan menerapkan kurikulum adaptif (fleksibel)</p> <p>3. Tahun 2025: jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki bahan bacaan berjenjang yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran literasi dan numerasi siswa</p> <p>4. Tahun 2025: kemampuan literasi siswa kelas awal mencapai peringkat 3 besar di NTB</p> <p>5. Tahun 2025: kemampuan numerasi siswa kelas awal mencapai peringkat 1 di NTB</p>	-	Kurikulum	-	1	1	1	1	1	<p>1) Penyusunan kurikulum muatan local satuan pendidikan dasar</p> <p>2) Penguatan guru dan kepala sekolah dalam penyusunan kurikulum</p> <p>3) Penyediaan bahan bacaan berjenjang sesuai kebutuhan yakni, 70% buku paket dan 30 buku pengayaan</p> <p>4) Penguatan Peran dan fungsi Guru dan Kepala sekolah di bidang literasi dan numerasi</p> <p>5) Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan guru dalam memfasilitasi proses pengembangan kompetensi minimal peserta didik seperti, literasi dan numerasi masih kurang</p> <p>6) Peningkatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan</p>	Pengelolaan Pendidikan
			19	sekolah	19	19	50	75	89	124		
			7	Peringkat	7	6	5	4	3	3		
			4	Peringkat	4	4	3	2	1	1		



